

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT.BPR NUSAMBA KUBUTAMBAHAN
TAHUN 2023**



**JALAN RAYA AIR SANIH DESA KUBUTAMBAHAN
TELEPON: 0362 3435050**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Nusamba Kubutambahan pada tahun 2023 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2023 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.

PT.BPR Nusamba Kubutambahan memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT.BPR Nusamba Kubutambahan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada PT.BPR Nusamba Kubutambahan didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Tata Kelola di lingkungan PT.BPR Nusamba Kubutambahan.

PT.BPR Nusamba Kubutambahan telah beroperasi 33 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kewajaran. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, PT.BPR Nusamba Kubutambahan selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang tahun 2023 dan untuk di tahun mendatang, PT.BPR Nusamba Kubutambahan terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Ni Luh Putu Ari Padmini,SE
	NIK	:	5108064103640005
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas :</p> <p>a.Mewakili BPR di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga serta menjalankan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan yang jelas.</p> <p>b.Melaporkan kepada perseroan tentang saham yang dimilikinya dan/ atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.</p> <p>c.Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir</p> <p>d.Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.</p> <p>e.Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p> <p>f.Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja</p> <p>Tanggung Jawab :</p> <p>a.Terkoordinirnya semua aktivitas BPR, baik bidang operasional, kredit dan pemasaran serta Sumber Daya Manusia dengan sebaik-baiknya.</p> <p>b.Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien.</p> <p>c.Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>d.Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program APU PPT</p> <p>e.Mempertanggung jawabkan kepada Pemegang Saham atas jalannya operasional Bank.</p> <p>f.Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pembaharuan Teknologi Informasi.</p> <p>g.Bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.</p> <p>h.Bertanggung jawab terhadap penerapan Budaya Kepatuhan dan Anti Fraud.</p>			
2.	Nama	:	Ketut Asri Setiawati Sima,SST.Par
	NIK	:	5108085402830001
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab :

Tugas :

- a.Mewakili BPR di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga serta menjalankan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan yang jelas.
- b.Melaporkan kepada perseroan tentang saham yang dimilikinya dan/ atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
- c.Mebuat laporan tahunan dan dokumen keuangan BPR.
- d.Memastikan terselenggaraannya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati - hatian.
- e.Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja
- f.Mematuhi ketentuan tentang Kepatuhan atau ketentuan lain yang dikeluarkan oleh OJK dan Otoritas Lainnya.
- g.Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah berjalan secara independent

Tanggung Jawab :

- a.Bekerjasama dengan Direktur Utama dalam membuat kebijakan dan ketentuan yang tidak bertentangan dengan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- b.Membuat kesepakatan-kesepakatan dengan pihak ketiga yang sesuai berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- c.Bersama- sama Direktur Utama membentuk unit atau mengangkat Pejabat yang memiliki fungsi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan.
- d.Bersama- sama Direktur Utama menetapkan rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi BPR.
- e.Bersama- sama Direktur Utama menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan mengkomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun teknologi informasi.
- f.Bersama-sama Direktur Utama melakukan evaluasi atas pelaksanaan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan yang telah dilakukan

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.

- a. Manajemen telah melakukan perbaikan strategi pencapaian forecast 2023 dan sosialisasi RBB 2024
- b. Melakukan kontrol terhadap action plan kredit relaksasi Covid-19 dengan memperhatikan tingkat tunggakan bunga, risiko koreksi PAD, jusment kolektibility dan PPAP sesuai SOP internal berdasarkan konsep disiplin eksekusi sebagaimana telah dituangkan dalam RBB 2023
- c. Melakukan Langkah antisipasif pelaksanaan RBB dengan memperhatikan asas kebutuhan SDM baik kuantitas dan kualitas berpedoman pada POJK, SOP internal/ Struktur organisasi sehingga proses operasional berjalan sesuai dengan yang direncanakan
- d. Menajaemen segera melakukan FGD khusus unit kredit melihat kecendrungan KYD mengalami penurunan dan pencapaian jauh dibawah target
- e. Membuat dan merampungkan action plan pada kesempatan pertama terhadap kredit relaksasi COVID-19 dengan memperhatikan tingkat tunggakan bunga, risiko PAD, jusment kolektibility dan PPAP yang akan berdampak pada kemampuan BPR- Slalu

<p>patuh terhadap SOP, regulasi tentang BPR seperti PPAP, Pengakuan Bunga Kredit lancar (90 hari) dan lainnya</p> <p>f. Direksi telah melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan kredit baik produk, strategi dan penguatan unit bisnis Bank</p> <p>g. Direksi telah membuat action plan pada kesempatan pertama terhadap kredit relaksasi COVID-19 dengan memperhatikan tunggakan bunga, risiko PAD, jusment kolektibility dan PPAP yang akan berdampak pada kemampu labaan BPR</p>
Penjelasan Lebih Lanjut :
NIHIL

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Drs I Gede Budiasa
	NIK	:	5108083112630015
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas :</p> <p>a. Mengawasi kebijakan Direksi</p> <p>b. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan program APU dan PPT</p> <p>c. Menyetujui seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Direksi</p> <p>d. Menyetujui RBB yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham</p> <p>e. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran.</p> <p>f. Mengadakan rapat bulanan dan triwulan</p> <p>g. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Bank.</p> <p>i. Melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian Bank.</p> <p>Tanggung Jawab ;</p> <p>a. Memastikan Operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>b. Melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya , baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.</p> <p>c. Memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi.</p> <p>d. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko</p> <p>e. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>f. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang setiap semester</p>			
2.	Nama	:	I Made Artana,SE
	NIK	:	5108060611700002

Jabatan	:	Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas :</p> <p>a.Bersama -sama Komisaris Utama mengawasi kebijakan Direksi</p> <p>b.Bersama -sama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan APU PPT</p> <p>c.Bersama -sama Komisaris Utama menyetujui seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Direksi</p> <p>d.Bersama -sama Komisaris Utama menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham</p> <p>e.Bersama -sama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran.</p> <p>f.Bersama -sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pemegang saham setiap bulan.</p> <p>g.Melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance</p> <p>h.Bersama - sama Komisaris Utama melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi .</p> <p>Tanggung Jawab :</p> <p>a.Bersama - sama Komisaris Utama memastikan Operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>b.Bersama -sama Komisaris Utama melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.</p> <p>c.Bersama - sama Komisaris Utama memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.</p> <p>d.Bersama -sama Komisaris Utama menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu- waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.</p> <p>e.Bersama - sama Komisaris Utama memastikan penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi</p> <p>f.Bersama - sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko, paling sedikit setiap semester.</p>		
Rekomendasi Kepada Direksi :		
<p>Rekomendasi Dewan Komisaris untuk pengembangan dan perbaikan kinerja kepada Direksi yaitu :</p> <p>a.Membuat kebijakan pertumbuhan kredit yang mengedepankan unsur motivasi dan menumbuhkan tanggungjawab team</p> <p>b.Membangun kolaborasi team Bisnis dengan intensitas FGD yang memadai dan cukup</p> <p>c. Membangun database berdasarkan potensi pasar, sektor pembiayaan, usaha turunan , channelling, crosselling dengan melibatkan team IT untuk mempercepat hasil informasi dalam membuat kebijakan strategis</p> <p>d.Disiplin eksekusi dalam penyelesaian NPL berdasarkan action plan ; Melakukan strategi pencegahan dengan pembinaan dan pemantauan secara prioritas terhadap kredit tunggakan 2-3 bulan</p> <p>e.Memperkuat relationship bersama nasabah potensial dan Lembaga Keuangan mitra BPR melalui program maintenance seperti gathering dalam kemasam</p>		

<p>khusus</p> <p>f. Mengembangkan pasar dengan fokus pada segmen komunitas</p> <p>g. Melakukan pelatihan dan pendidikan khusus analisa kredit kepada seluruh karyawan dalam mensukseskan strategi full marketing dan target bersama pertumbuhan kredit.</p> <p>h. Menjaga volume penyaluran kredit konvensional agar tetap bertumbuh</p> <p>i. Menciptakan pengawasan terintegrasi antar lini sehingga tercipta tata kelola (GCG) yang sehat dan membudayakan prinsip Zero Fraud.</p> <p>j. Melakukan kaderisasi yang baik untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam menunjang operasional</p> <p>k. Melakukan Evaluasi dan kajian kebijakan pertumbuhan kredit konvensional dalam menghadapi tahun anggaran 2024</p> <p>l. Melakukan pemenuhan SDM baik kompetensi dan kuantitas dalam menunjang pertumbuhan usaha tahun anggaran 2024</p> <p>m. Direksi memastikan seluruh operasional BPR berjalan sesuai SOP, ketentuan internal, POJK dan ketentuan perbankan yang berlaku khususnya dibidang manajemen risiko (MR) sehingga tercipta tata kelola BPR yang sehat.</p>
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
NIHIL	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	NIHIL	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
NIHIL			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ni Luh Putu Ari Padmini,SE	5108064103640005	Rp0	0%
2.	Ketut Asri Setiawati Sima,SST.Par	5108085402830001	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				

Kepemilikan saham anggota Direksi pada PT. BPR Nusamba Kubutambahan tidak ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ni Luh Putu Ari Padmini,SE	5108064103640005	-	-	0%
2.	Ketut Asri Setiawati Sima,SST.Par	5108085402830001	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR lain dan perusahaan lain					

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ni Luh Putu Ari Padmini,SE	5108064103640005	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ketut Asri Setiawati Sima,SST.Par	5108085402830001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Hubungan keuangan anggota Direksi pada BPR tidak ada					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ni Luh Putu Ari Padmini,SE	5108064103640005	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ketut Asri Setiawati Sima,SST.Par	5108085402830001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Hubungan keuangan anggota Direksi pada BPR tidak ada					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs I Gede Budiasa	5108083112630015	Rp0	0%
2.	I Made Artana,SE	5108060611700002	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak terdapat kepemilikan saham antara anggota Dewan Komisaris pada BPR				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs I Gede Budiasa	5108083112630015	-	-	0%
2.	I Made Artana,SE	5108060611700002	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain					

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Drs I Gede Budiasa	5108083112630015	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Made Artana,SE	5108060611700002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak terdapat Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Nusamba Kubutambahan					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Drs I Gede Budiasa	5108083112630015	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Made Artana,SE	5108060611700002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak terdapat hubungan keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp654	2	Rp361
2.	Tunjangan	2	Rp183	2	Rp78
3.	Tantiem	2	Rp35	2	Rp15
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp872		Rp454
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Remunerasi diberikan berdasarkan hasil RUPS					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Perumahan (1)	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Dinas (2)	Mobil Dinas (2)
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	BPJS Kesehatan (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Pulsa, DPLK, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Jiwa (2)	Pulsa, DPLK, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Jiwa (2)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris sudah ditetapkan berdasarkan RUPS			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima selama setahun	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	20 Maret 2023	2	1. Pembukaan 2. Kinerja s/d Pebruari'2023 3. Evaluasi tindaklanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris Triwulan IV '2022 4. Evaluasi kebijakan manajemen risiko dan APU-

			<p>PPT</p> <p>5. Isu-isu Strategis pengembangan</p> <p>6. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk Pengembangan dan Perbaikan Kinerja kepada Direksi</p> <p>7. Penutup</p>
2.	19 Juni 2023	2	<p>1. Pembukaan</p> <p>2. Kinerja s/d MEI'2023</p> <p>3. Evaluasi tindaklanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris Triwulan I '2023</p> <p>4. Evaluasi kebijakan manajemen risiko dan APU-PPT</p> <p>5. Isu-isu Strategis pengembangan</p> <p>6. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk Pengembangan dan Perbaikan Kinerja kepada Direksi</p> <p>7. Penutup</p>
3.	25 September 2023	2	<p>1. Pembukaan</p> <p>2. Kinerja s/d Agustus'2023</p> <p>3. Evaluasi tindaklanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris Triwulan II '2023</p> <p>4. Evaluasi kebijakan manajemen risiko dan APU-PPT</p> <p>5. Isu-isu Strategis pengembangan</p> <p>6. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk Pengembangan dan Perbaikan Kinerja kepada Direksi</p> <p>7. Penutup</p>
4.	11 Desember 2023	2	<p>1. Pembukaan</p> <p>2. Kinerja s/d Nopember'23</p> <p>3. Evaluasi tindaklanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris Triwulan III '2023</p> <p>4. Evaluasi kebijakan manajemen risiko dan APU-PPT</p> <p>5. Isu-isu Strategis pengembangan</p> <p>6. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk Pengembangan dan Perbaikan Kinerja kepada Direksi</p> <p>7. Penutup</p>
<p>Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :</p>			
<p>Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat triwulan sesuai dengan Ketentuan Internal</p>			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Drs I Gede Budiasa	5108083112630015	4	0	100%
2.	I Made Artana,SE	5108060611700002	4	0	100%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Rapat Anggota Dewan Komisaris dilaksanakan secara triwulan yaitu :

1. Triwulan I dilaksanakan tanggal 20 Maret 2023 dengan agenda pembahasan :

- a. Pembukaan
- b. Kinerja s/d Pebruari'2023
- c. Evaluasi tindaklanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris Triwulan IV '2022
- d. Evaluasi kebijakan manajemen risiko dan APU-PPT
- e. Isu-isu Strategis pengembangan
- f. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk Pengembangan dan Perbaikan Kinerja kepada Direksi
- g. Penutup

2. Triwulan II dilaksanakan tanggal 19 Juni 2023 dengan agenda pembahasan :

- a. Pembukaan
- b. Kinerja s/d MEI'2023
- c. Evaluasi tindaklanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris Triwulan I '2023
- d. Evaluasi kebijakan manajemen risiko dan APU-PPT
- e. Isu-isu Strategis pengembangan
- f. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk Pengembangan dan Perbaikan Kinerja kepada Direksi
- g. Penutup

3. Triwulan III dilaksanakan tanggal 25 September 2023 dengan agenda pembahasan :

- a. Pembukaan
- b. Kinerja s/d Agustus'2023
- c. Evaluasi tindaklanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris Triwulan II '2023
- d. Evaluasi kebijakan manajemen risiko dan APU-PPT
- e. Isu-isu Strategis pengembangan
- f. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk Pengembangan dan Perbaikan Kinerja kepada Direksi
- g. Penutup

4. Triwulan IV dilaksanakan tanggal 11 Desember 2023 dengan agenda pembahasan :

- a. Pembukaan
- b. Kinerja s/d Nopember'23
- c. Evaluasi tindaklanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris Triwulan III '2023
- d. Evaluasi kebijakan manajemen risiko dan APU-PPT
- e. Isu-isu Strategis pengembangan
- f. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk Pengembangan dan Perbaikan Kinerja kepada Direksi
- g. Penutup

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
NIHIL								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	2	0
Dalam Proses Penyelesaian	9	0
Total	11	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Debitur yang dalam proses penyelesaian melalui gugatan sederhana yaitu :		
1. Wahyu Handayani 2. I Kadek Witama Arya 3. I Putu Ada Atmaja 4. Hilman Faelani 5. Ketut Agus Mawa 6. Kadek Sri Ari Widnyani 7. Putu Mahareni 8. Kadek Darma 9. I Wayan Renten		
Debitur yang telah selesai dan debitur telah melunasi yaitu 2 orang atas nama Ni Made Rosmayanthi dan Fitria		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
NIHIL									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

NIHIL

Kubutambahan, 26 Januari 2024

PT.BPR NUSAMBA KUBUTAMBAHAN



Drs. I Gede Budiassa
Komisaris Utama



Ni Luh Putu Ari Padmini, SE
Direktur Utama